PENGUATAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA MELALUI DIGITALISASI INFORMASI: STUDI PADA DESA KUBANG TANGAH SAWAHLUNTO

Serli Marshanda[1], Laurra Acsa Liani[2], Alvito Nikola Melindryan[3], Syndi Putri Harfianti[4], Vania Putri Andini[5], Suvenratno[6], Rizki Syafril[7]

[1,2,3,4,5,6,7]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : serlimarshanda27@gmail.com[1], laurraacsaliani@gmail.com[2], alvitonicola30@gmail.com[3], syndiptrri35@gmail.com[4], vaniaputriardini@gmail.com[5], suvendratno9@gmail.com[6], rizkisyafril@fis.unp.ac.id[7]

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of village information digitalization and the application of the Village Financial System (Siskeudes) in enhancing the accountability of the Kubang Tangah Village Government, Sawahlunto City. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that the digitalization of information through the village website, social media, and APBDes billboards has improved transparency and increased community participation in monitoring village development. The implementation of the Siskeudes application has also strengthened the accountability of village financial management through more orderly and integrated recording and reporting systems. However, its implementation still faces challenges, including limited internet access, operational costs, and human resource competency. Overall, digitalization and the use of Siskeudes contribute positively to realizing a transparent and accountable village government.

Keywords : *Village Information Digitalization, Siskeudes, Accountability, Transparency, Village Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi informasi desa dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah Desa Kubang Tangah, Kota Sawahlunto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi informasi melalui website desa, media sosial, dan baliho APBDes mampu meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Penerapan aplikasi Siskeudes juga terbukti memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih tertib dan terintegrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet, biaya operasional, dan kompetensi sumber daya manusia. Secara keseluruhan, digitalisasi dan penggunaan Siskeudes memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Digitalisasi Informasi Desa, Siskeudes, Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Era digital saat ini mununtut pemerintah untuk memanfaat teknologi dalam berbagai kegiatan pemerintah (Dija & Syafril, 2024). Perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, berbagai regulasi seperti UU Desa dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong desa untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana publikasi informasi, pengelolaan keuangan, dan pelayanan administrasi. Berbagai instansi telah menerapkan aplikasi digital sebagai transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Ramadhani & Syafril, 2025). Dalam konteks ini, digitalisasi informasi desa tidak hanya dipahami sebagai upaya modernisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah (Nyoman et al., 2025)

Digitalisasi informasi desa kini banyak diwujudkan melalui website desa, media sosial, Sistem Informasi Desa (SID), dan platform digital lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas tata kelola desa (Gede et al., 2025). Informasi pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan laporan anggaran dapat diakses lebih cepat dan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi informasi menjadi aspek penting dalam memperkuat transparansi pemerintah desa. Transparansi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan terbuka, dimana masyarakat memiliki akses penuh terkait dengan informasi desa. Melalui digitalisasi seperti media sosial, web desa dan lainnya ini mampu mewujudkan transparansi pemerintah desa kepada masyarakat (Nyoman et al., 2025).

Dalam keuangan desa, pemerintah juga harus bertanggungjawab memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan dan sesuai dengan regulasi. Pengelolaan keuangan desa juga menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintah yang akuntabel. Akuntabilitas dan keterbukaan laporan keuangan desa ini dgunakan oleh masyarakan untuk menilai kinerja perangkat desa dan sebagai media transparansi dan akuntabilitas informasi pemerintah desa (Mawardi, 2021). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB) dan Laporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Namun dalam praktiknya, akuntabilitas dan transpransi pemerintah desa masih sangat rendah. Penelitian (Nyland & Pettersen, 2015)menunjukkan bahwa masih rendahnya akuntabilitas dan transpransi laporan keuangan kepada publik yang menyebabkan kegagalan administrasi, keputusan politik dan tingkat korupsi yang tinggi. (Sena & Syafil, 2025)menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada peningkatan komunikasi kepada masyarakat, tetapi juga pada efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi internal. Sehingga, dalam mengatasi hal tersebut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan sebuah aplikasi digital yang dikenal dengan Sistem Keungan Desa (SISKEUDES**)** (Mawardi, 2021)

Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES) adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa oleh perangkat desa. Infromasi SISKEUDES dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

(Pratiwi & Pravasanti, 2020). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darwin, 2017) menyatakan bahwa implementasi SISKEUDES memberikan dampak baik dari segi waktu dan biaya. Namun, penelitian (Afrizal et al., 2016), menunjukkan bahwa pengelolan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES masih memiliki kekurangan dalam hal belum tersedianya SDM yang memadai.

Penelitian ini melihat penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Kubang Tangah, Kota Sawahlunto. Desa ini merupakan salah satu desa yang telah menerapkan digitalisasi informasi serta menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangannya. Meskipun demikian, belum banyak kajian akademik yang secara spesifik membahas bagaimana implementasi digitalisasi informasi baik melalui media informasi digital maupun melalui aplikasi pengelolaan keuangan desa mampu memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggali kendala yang dihadapi desa dalam mengoptimalkan penggunaan Siskeudes dan digitalisasi informasi lainnya. Gap inilah yang menjadikan penelitian ini relevan dan penting, yakni untuk menganalisis implementasi digitalisasi informasi desa, penerapan aplikasi Siskeudes, dampak digitalisasi terhadap akuntabilitas, serta tantangan implementasi Siskeudes.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara mendalam, memahami kondisi sosial di lapangan, serta memperoleh data langsung dari informan melalui interaksi alamiah (Sugiyono, 2023). Penelitian ini berlokasi di Desa Kubang Tangah, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Alasan pemilihan lokasi karena Desa ini memiliki karakteristik sosial, pemerintahan, dan aktivitas masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan pada 13 November 2025, termasuk kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi awal. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap mengetahui informasi penting terkait fenomena penelitian. Yang mana informan penelitian ini adalah Kepala Desa Kubang Tangah dan beberapa staff Desa Kubang Tangah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi digitalisasi informasi desa

Implementasi digitalisasi informasi desa sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa secara efektif melalui pelaporan publik di website desa (Rinayuhani et al., 2025). Pada aspek pemerintahan, digitalisasi sebagai proses adaptasi teknologi digital yang memungkinkan peningkatan sistem kerja yang lebih akurat, akuntabel dan juga hemat biaya. Selain itu, melalui digitalisasi informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengurus dokumen, memberikan saran atau kritik bahkan dapat mendorong komunikasi pemerintahan dan akuntabilitas publik (Darmawan et al., 2025).

Dalam mendukung hal tersebut, Pemerintah Desa Kubang Tangah telah mulai memanfaatkan kanal digital dalam melakukan publikasi informasi keuangan seperti realisasi anggaran (APBDes). Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen Pemerintah Desa Kubang Tangah terhadap keterbukaan informasi yang sejalan dengan praktik Tata kelola pemerintahan yang baik. Didukung oleh pernyataan wawancara bersama Bapak Rice selaku Kepala Desa Kubang Tangah:

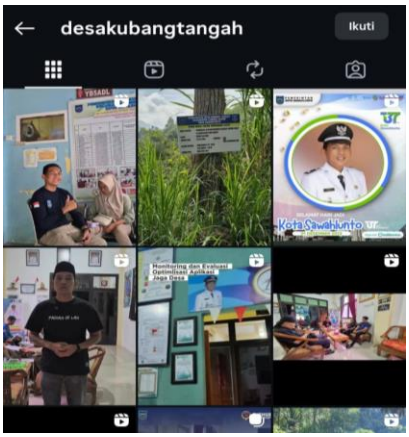
> "Tentu kita menyesuaikan dengan perkembangan sekarang era digitalisasi kita punya website dan media sosial untuk informasi bentuk transparansi itu juga ada baliho di tempat strategis untuk menyampaikan terkait realisasi anggaran desa dan juga APBDes tahun berjalan didalamnya memuat infografis" (Kamis, 13 November 2025).

Digitalisasi informasi di Desa Kubang Tangah dilakukan dengan memanfaatkan media penyebaran informasi kepada masyarakat. Dari pernyataan Kepala Desan Kubang Tangah tersebut, Desa ini memanfaatkan website desa, media sosial dan baliho yang disebar dibeberapa titik dalam memberikan informasi terkait dengan APBDes, realisasi anggaran dan kegiatan pembangunan. Kemudian, Kepala Desa Kubang Tangah juga menegaskan bahwa digitalisasi ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan keterbukaan di era modern. Sehingga, dengan adanya digitalisasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara lebih mudah.



Gambar 2. Website Desa Kubang Tangah

Pemerintah Desa Kubang Tangah menggunakan website desa sebagai langkah memperluas transparansi dan mendukung partisipasi masyarakat. Gambar 1 menunjukkan bahwa Desa Kubang Tangah telah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam digitalisasi informasi. Melalui website desa, masyarakat Desa Kubang Tangah dapat mengakses informasi kapan saja terkait dengan informasi desa.



Gambar 3. Media Sosial Desa Kubang Tangah

Selain website, pemerintah desa juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pengumuman, jadwal musyawarah, pelaporan kegiatan dan penyebaran informasi. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2 yang menujkkan bahwa peemrintah Desa Kubang Tangah cukup aktif dalam mempublikasikan berbagai kegiatan yang diadakan di Desa tersebut. Untuk mempertimbangkan jangkauan warga yang kurang aktif bermedia sosial, Pemerintah Desa Kubang Tangah juga memberikan informasi melalui baliho dan infografis APBDes yang ditempatkan di lokasi strategis. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Desa untuk memastikan informasi sampai pada semua kelompok masyarakat Desa Kubang Tangah.

Implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Kubang Tangah

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel (BPKP, 2015). Siskeudes merupakan program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memonitor setiap pergerakan dan pengeluaran keuangan desa secara langsung. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ruce selaku Kepala Desa Kubang Tangah,

> "Program dari pemerintah pusat Kementerian dalam negeri dan kementrian desa untuk peraturan keuangan, setiap pergerakan dan pengeluaran desa langsung dimonitor oleh pemerintah pusat, sangat bagus untuk memonitor persoalan keuangan" (Kamis, 13 November 2025).

Implementasi Siskeudes di tingkat desa memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

a. Meningkatkan Transparansi Keuangan
   Siskeudes memungkinkan pemerintah desa untuk menyajikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Kepala Desa Kubang Tangah menyatakan bahwa aplikasi ini sangat berkontribusi dalam transparansi keuangan karena "asumsi buruk masyarakat terhadap pemerintah desa dapat berkurang." Hal ini sejalan dengan penelitian (Widyatama & Novita, 2017) yang menemukan bahwa penggunaan Siskeudes dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
b. Memudahkan Pengawasan Pemerintah Pusat
   Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah pusat dapat melakukan monitoring secara real-time terhadap pengelolaan keuangan di setiap desa. Hal ini meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas (Subroto, 2009).

c. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Siskeudes menyediakan mekanisme pelaporan yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan pertanggungjawaban keuangan negara yang disalurkan melalui dana desa.

Desa Kubang Tangah telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desanya. Implementasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. Menurut Kepala Desa, pemerintah desa berperan sebagai penyalur dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, sehingga penggunaan sistem yang akuntabel menjadi sangat penting. Selain Siskeudes, Desa Kubang Tangah juga menggunakan berbagai media untuk meningkatkan transparansi keuangan:

a. Media Digital yaitu Website dan media sosial desa digunakan untuk menyebarkan informasi keuangan kepada masyarakat luas, mengikuti perkembangan era digitalisasi.
b. Media Konvensional yaitu Baliho di tempat-tempat strategis dipasang untuk menampilkan realisasi anggaran desa dan APBDes tahun berjalan dalam bentuk infografis yang mudah dipahami masyarakat.

Untuk memastikan seluruh perangkat desa memahami prinsip akuntabilitas keuangan, pemerintah Desa Kubang Tangah secara rutin mengadakan rapat internal. Melalui wawancara bersama Bapak Ruce selaku Kepala Desa menyatakan,

> "Setiap ada aturan baru semuanya harus dibahas kita sampaikan supaya seluruhnya dapat memahami." (Kamis, 13 Nomber 2025). Hal ini penting mengingat Siskeudes memerlukan pemahaman teknis dan komitmen dari seluruh aparatur desa dalam pengoperasiannya (Murtiani et al., 2023).

Dampak digitalisasi terhadap akuntabilitas

Digitalisasi informasi Desa di Desa Kubang Tangah memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena data anggaran, kegiatan, dan keputusan tidak lagi hanya tersimpan secara manual, tetapi terdokumentasi dalam sistem digital yang mudah diaudit dan ditelusuri. (Hidayat, 2024) menunjukkan bahwa sistem informasi terintegrasi pada pemerintah daerah mampu memperjelas alur pertanggungjawaban dan mengurangi ruang manipulasi, karena setiap transaksi tercatat dan dapat diakses kembali saat diperlukan.

Pemanfaatan website desa, media sosial, dan infografis APBDes di ruang publik menjadikan masyarakat lebih mudah mengakses informasi keuangan dan pembangunan desa, sehingga fungsi pengawasan publik ikut menguat. Penelitian tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran berhubungan positif dengan kualitas pengelolaan dana desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penerapan aplikasi Siskeudes sebagai alat pencatatan keuangan desa memberikan dampak langsung pada peningkatan akuntabilitas keuangan. (Desy Riana & Mursyidah, 2025) menemukan bahwa Siskeudes memperjelas mekanisme pelaporan, memperkuat dokumentasi bukti transaksi, dan memudahkan proses audit sehingga pertanggungjawaban keuangan desa menjadi lebih sistematis dan transparan. Pemerintah Desa Kubang Tangah juga mendukung bentuk prinsip akuntabilitas melalui aplikasi SISKEUDES.

Penghargaan Desa Antikorupsi Provinsi Sumatera Barat yang diraih Desa Kubang Tangah menjadi salah satu indikator keberhasilan dari implementasi digitalisasi dalam membangun akuntabilitas desa secara komprehensif. Sesuai dengan penelitian (Sumaryati & Suyitno, 2024), menyatakan bahwa Penghargaan desa anti korupsi sebagai upaya mendorong Pemerintah Desa dan segenap masyarakat untuk lebih beroartisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintah desa yang

transparan, akuntabel serta pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan penghargaan ini, Desa Kubang Tangah telah menujukkan bahwa pemerintah desa mampu melakukan pengelolaan dana desa yang transparan dan terkontrol melalui sistem digital.

Secara keseluruhan, digitalisasi pengelolaan keuangan dan informasi desa mendorong munculnya "akuntabilitas digital", yaitu pola pertanggungjawaban yang berbasis pada data dan sistem daring. (Ferdiansyah et al., 2025)membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan desa; semakin tinggi komitmen terhadap keterbukaan, semakin kuat dorongan untuk menggunakan sistem digital yang terstruktur dan mudah diakses publik.

Tantangan implementasi aplikasi Siskeudes

Implementasi Siskeudes di Desa Kubang Tangah juga menghadapi beberapa kendala:

a. Kendala Infrastruktur
   Kepala Desa mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terkait jaringan internet. Hal ini dukung oleh pernyataan kepala Desa Kubang Tangah melalui wawancara:
   > "Kendala tentu ada, terutama terkait jaringan internet yang harus baik. Untuk mendapatkan internet yang baik, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan" (Kamis, 13 November 2025).
b. Biaya Operasional
   Kebutuhan akan koneksi internet yang stabil menambah beban biaya operasional pemerintah desa. Dalam konteks anggaran desa yang terbatas, hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan keuangan desa.
c. Kompetensi Sumber Daya Manusia
   Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam transkrip, penggunaan aplikasi berbasis teknologi seperti Siskeudes memerlukan kompetensi SDM yang memadai. Hal ini berkaitan dengan fokus Desa Kubang Tangah pada "pelatihan sumber daya manusianya" karena "merubah mindset manusia itu susah." Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan aparatur desa dapat mengoperasikan Siskeudes secara optimal.

KESIMPULAN

Digitalisasi informasi dan penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Kubang Tangah telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui pemanfaatan website desa, media sosial, dan baliho publik, pemerintah desa mampu menghadirkan keterbukaan informasi yang lebih luas dan mudah diakses masyarakat. Upaya ini memperkuat transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau pembangunan, anggaran, dan kegiatan desa, sehingga fungsi pengawasan publik semakin meningkat. Implementasi Siskeudes menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem ini membantu memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat secara sistematis, terintegrasi, dan dapat dimonitor langsung oleh pemerintah pusat. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat dan berkurangnya potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan jaringan internet, biaya operasional teknologi, serta kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan dalam penguatan infrastruktur dan pelatihan aparatur desa. Secara keseluruhan, digitalisasi informasi dan

penggunaan Siskeudes di Desa Kubang Tangah telah memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini menjadi langkah penting dalam memperkuat prinsip good governance pada tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rice selaku Kepala Desa Kubang Tangah yang telah bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis, serta seluruh tim kelompok yang telah membantu dalam penyelesaian artikel. Semoga dengan adanya artikel ini, dapat memberikan informasi atau ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

REFERENSI

Afrizal, Mazaliza, Z., & Khudri, A. (2016). *Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang Melalui Aplikasi Siskeudes*. 1–8.

Bpkp. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* .

Darmawan, A., Dema, H., Rais, M., Razak, R., & Lubis, S. (2025). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalempang Kabupaten Sidenreng Rappang. In *Jurnal Dinamika Pemerintahan* (Vol. 8, Issue 2).

Darwin. (2017). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai Regional. *Jurnal Universitas Hasanuddin*.

Desy Riana, A., & Mursyidah, L. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa MelaluiAplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). In *Jiap* (Vol. 11, Issue 3).

Dija, A. C., & Syafril, R. (2024). Optimalisasi Penggunaan E-Survey Polri Di Polresta Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *5*(2). Https://Doi.Org/10.47134/Villages.V5i2.164

Ferdiansyah, I., Tatmimah, I., & Muzayyanah. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebmak)*, *4*(2), 449–460.

Gede, I., Pramana, A., Luh, N., Sulastri, P., Ketut, I., & Wicaksan, A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Pelayanan Publik Di Desa Tertinggal. *Journal Of Community Action*, *1*(2), 35–41. Https://Doi.Org/10.71094/Joca.V1i1.Xxx

Hidayat, M. N. (2024). Enhancing Accountability And Transparency In Local Governance Through Integrated Information Systems: A Case Study Of Surabaya City, Indonesia. *Visioner* , *16*(3), 228–238.

Mawardi, M. C. (2021). Effectiveness Of Implementation Of Village Financial System Applications (Siskeudes) In Improving Accountability And Transparency Of Financial Statements Grati Village Sub-District Sumbersuko Lumajang District. *Jurnal Rekognisi Akuntasi* , *5*(2), 137–143. Http://Ejournal.Unisnu.Ac.Id/Jra/

Murtiani, Handajani, L., & Waksito, I. (2023). Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Kuangan Desa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang* , 931–947. Https://Journal.Unimma.Ac.Id

Nyland, K., & Pettersen, I. J. (2015). Hybrid Controls And Accountabilities In Public Sector Management Three Case Studies In A Reforming Hospital Secto. *International Journal Of Public Sector Management*, *28*(2).

Nyoman, D., Lestari, L., & Darma, G. M. (2025). Systematic Literature Review (Slr): Transparency And Accountability In Village Financial Management. *International Journal Of Economics, Accounting, And Management*, *1*(5).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *20*(2). Https://Doi.Org/10.29040/Jap.V20i2.770

Ramadhani, N., & Syafril, R. (2025). Efektivitas Pelayanan Administrasi Melalui Aplikasi Srikandi Dan Newsurek Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Edu Research Iicls* , *6*(3), 1096–1104.

Rinayuhani, T. R. R., Wachidah, H. N., & Z.D, R. (2025). Good Governance Through Digitalization Of Government In Sidomulyo Village, Bangsal District, Mojokerto Regency. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(7), 448–459. Https://Doi.Org/10.55681/Sentri.V4i7.4329

Sena, A. F., & Syafil, R. (2025). Implementasi Aplikasi Ptsp+ Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Akuntabilitas Dalam Proses Administrasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Pengadilan Negeri Bukittinggi. *Jurnal Edu Research Iicls* , *6*(3), 1189–1194.

Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo, Ed.; 5th Ed.). Alfabeta. Www.Cvalfabeta.Com

Sumaryati, & Suyitno. (2024). Implementasi Kebijakan Desa Antikorupsi Di Kalurahan Karangsewu Kulon Progo. *Pancasila And Civics Education Journal*, *3*(2), 24–32.

Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). In *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* (Vol. 02, Issue 02).